

**ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI
KABUPATEN NATUNA
(Tahun Anggaran 2009-2013)**

**Oleh:
Gustra Arianda
Nurazlina
H. Mudrika Almsyah Hasan**

Faculty of economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
email : mandirinet09@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to analys the progress of district finance ability to support the autonomy of natuna among 2009-2013.

The type of thies research is descriptve comparative. Data of this research are based on APBD and then analys by the ratio of local financial autonomy, the degree of fiscal decentralization, routine ability index, the ratio of harmony and growth ratios.

Based on the results of the analysis has been done obtained the following results: Based on the ratio of local financial autonomy was performe the ability to pay a goverment programe, development and service to the society that have paid tax and retibution as a source of income of the district. the ratio of local financial autonomy is 2.11%. It meant the value of the ratio of local financial autonomy is too low. The degree of fiscal decentralization of Natuna District among 5 years is average of 2.70%. it meant the ability of Natuna ability goverment to increasing PAD and pay the expences of development still bad. Routine ability index ratio of Natuna District among 5 years is average of 2.73%. It meant the value of the Routine ability index ratio is too low. The ratio of harmony have a result that routine expenditure is bigger than the development expenditure. It meant the goverment's fund still prioritied to support a routine expenditure, so that the development expenditure will be small relatively. While growth ratios descriptve an ability iof district goverment to proof and increase the success from period to another period. Growth ratios among 5 years are 3 times positive growth suce as 2011, 2012 and 2013 but once negative growth in 2010.

Key Word : *ratio of local financial autonomy, the degree of fiscal decentralization, routine ability index, the ratio of harmony and growth ratios.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kawasan Pulau Natuna dan sekitarnya pada hakikatnya di karunia serangkaian potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara memadai atau ada yang belum dikelola sama sekali. Kabupaten Natuna wilayahnya dikelilingi oleh laut dalam. Dengan posisi dikelilingi laut luas, Natuna menjadi terpencil, serta minim fasilitas sosial dan fasilitas umum. Lautan luas seharusnya membuat Natuna menjadi penghasil di [Sektor Kelautan](#). Namun, letak Natuna terlalu jauh sehingga membuat nelayan tidak mampu memasarkan ikan tangkapannya. Sementara itu, fasilitas ruang pendingin untuk mengawetkan ikan juga minim. Kekayaan laut Natuna diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari satu juta ton ikan per tahun. Namun, saat ini baru 36% saja yang termanfaatkan. Pertanian dan perkebunan seperti ubi-ubian, kelapa, karet, sawit, dan cengkeh.

Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, belum sebanding dengan realisasi pembangunan. Sejak berdiri sebagai kabupaten otonom tahun 1999, tak banyak infrastruktur penting yang dibangun pemerintah daerah setempat. Salah satu faktor penyebab adalah korupsi.

"Dengan APBD setiap tahun di atas Rp 1 triliun dan jumlah penduduk hanya sekitar 67.000 jiwa, pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Natuna selama ini tak signifikan," kata anggota DPRD Kepulauan Riau dari Daerah Pemilihan Kabupaten Natuna.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan

tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Hal ini menjadi permasalahan di Kabupaten Natuna karena dana yang diterima sangat mencukupi namun kabupaten ini tidak dapat berdiri sendiri sesuai dengan otonomi daerah yang seharusnya. Karena Kab Natuna masih membutuhkan uluran bantuan dari pusat.

Kinerja keuangan dalam penelitian ini berupa rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Widodo, 2001 : 262).

Derajat desentralisasi fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. (Anita W, 2001 : 22):

Indeks kemampuan rutin merupakan Proporsi antara PAD

dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat (kuncoro,2007).

Rasio keserasian merupakan cara pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. (Widodo, 2001 : 262).

Rasio pertumbuhan. merupakan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan (Widodo, 2001 : 270)

Selanjutnya untuk menggambarkan dan menjawab berbagai masalah yang ada, peneliti menggunakan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu (pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain/pihak ekstern), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan (komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah), Rasio Indeks Kemampuan Rutin yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin

dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya(Perbandingan antara proporsi PAD dengan Total Pengeluaran Rutin, Rasio Keserasian yang Rasio Keserasian menggambarkan keseimbangan antara alokasi dana pemerintah daerah pada belanja rutin dan belanja pembangunan, Rasio Pertumbuhan yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Selanjutnya hasil analisis rasio keuangan dalam penelitian ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam menilai perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Akademisi telah banyak melakukan penelitian mengenai kinerja sektor publik diantaranya Anita Wulandari (2001), melakukan penelitian tentang kemampuan keuangan daerah di kota Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kota Jambi dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah, yang dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Widodo (2001), melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan masih relatif rendah dan cenderung menurun.

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis ingin mereplikasi dan mengembangkan penelitian-penelitian tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

1. Periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2008-2012, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode sebelum tahun 2005.
2. Daerah penelitian. Penelitian ini mengambil daerah penelitian di Kabupaten Natuna, sedangkan peneliti terdahulu mengambil daerah penelitian di kota Jambi, Boyolali, dan Sidoarjo.
3. Pada penelitian terdahulu, hasil penelitiannya tidak begitu baik pada setiap variabelnya. maka penulis sangat tertarik untuk menguji atau menganalisis perkembangan kemampuan keuangan daerah di daerah yang masih sangat minim perkembangannya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

**”ANALISIS
PERKEMBANGAN
KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH DI
KABUPATEN NATUNA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana perkembangan kemampuan keuangan daerah di

Kabupaten Natuna dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari Rasio Kemandirian keuangan Daerah ?

2. Bagaimana perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Natuna dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari derajat desentralisasi fiskal?
3. Bagaimana perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Natuna dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari, indeks kemampuan rutin?
4. Bagaimana perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Natuna dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari rasio keserasian?
5. Bagaimana perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Natuna dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari rasio pertumbuhan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasar latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Natuna dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari Rasio Kemandirian keuangan Daerah
2. Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Natuna dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari derajat desentralisasi fiskal
3. Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Natuna dalam

mendukung pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari indeks kemampuan rutin

4. Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Natuna dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari rasio keserasian
5. Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Natuna dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari rasio pertumbuhan

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

D. Kerangka Pemikiran, dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini tidak mempunyai pengaruh dari antar variabel karena penelitian ini tidak mempunyai var dependen ataupun independen. dan penelitian ini hanya menganalisis perkembangan kemampuan keuangan daerah berdasarkan 5 variabel tersebut. Data yang berasal dari APBD kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rumus perhitungan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Widodo, 2011 : 262).

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin Indeks Kemampuan Rutin yaitu : Proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat

4. Rasio Keserasian

Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif adalah suatu jenis metode penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor terjadinya atau munculnya fenomena tertentu (Mohammad Nazir, 2003:58).

Secara

2. Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Natuna. Dalam penelitian ini penulis memilih kabupaten Natuna dengan alasan penulis memiliki relasi di Kabupaten Natuna sehingga memudahkan dalam pengambilan data.

3. Data Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan melalui perantara / diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002:147). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD tahun anggaran 2007-2007. APBD tersebut diperoleh dari beberapa instansi pemerintah terkait, dalam hal ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah.

4. Metode Analisis Data

Data yang berasal dari APBD kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

Rasio kemandirian :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}}$$

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel III.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Anita Wulandari (2011: 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF : \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100 \%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t : Total PAD Tahun t

TPD_t : Total Pendapatan Daerah Tahun t

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Tabel III.2 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-20,00	Sangat Kurang
20,01-40,00	Kurang
40,01-60,00	Cukup
60,01-80,00	Baik
80,01-100	Sangat Baik

Sumber : Anita Wulandari (2001: 22)

Indeks Kemampuan Rutin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

IKR :

$$\frac{PAD}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

Keterangan :

IKR : Indeks Kemampuan Rutin

PAD : Pendapatan Asli Daerah

4. Rasio Keserasian

Secara sederhana rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Widodo, 2011 : 262) :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} : \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} : \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rumus yang digunakan adalah :

$$r : \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : Data yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ : Data yang dihitung pada tahun ke-0

r : Pertumbuhan

F. Hasil dan Pembahasan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Nilai rasio kemandirian keuangan untuk 5 tahun terakhir Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

INSERT TABEL 1

Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki rata-rata diantara 0 %-25 % yaitu sebesar 2.11%. Artinya angka tersebut memiliki status rendah sekali. Semakin rendah rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin tinggi.

Hal ini dikarenakan tingkat kemandirian dari Kabupaten ini sangat rendah dan tidak memungkinkan untuk dapat berdiri sendiri secara otonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan mengharapkan pihak ekstern untuk memberikan bantuannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian David efendi Sri wuryanti (2011) tentang Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah Dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Di kabupaten nganjuk. Dalam penelitian David (2011) menyatakan rasio kemandirian yang juga mempunyai status yang rendah sekali.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Nilai rasio derajat desentralisasi fiskal untuk 5 tahun terakhir Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

INSERT TABEL 2

Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Natuna selama lima tahun memiliki rata-rata sebesar 2,07%. hal ini berarti bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan masih sangat kurang.

Dengan kurangnya rasio Derajat Desentralisasi Fiskal maka tingkat pembangunan yang ada di Kabupaten Natuna tentu sangat kurang karena pemerintah tidak mampu melakukan pembangunan dengan menggunakan anggaran yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian David efendi Sri wuryanti (2011) tentang Analisis perkembangan kemampuan

keuangan daerah Dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Di kabupaten nganjuk. Dalam penelitian David (2011) menyatakan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang juga mempunyai status yang sangat kurang.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Nilai rasio indeks kemampuan rutin untuk 5 tahun terakhir Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

INSERT TABEL 3

Rasio Indeks Kemampuan Rutin selama lima tahun pada pemerintah Kabupaten Natuna masuk dalam skala yang sangat kurang, karena berada dalam skala interval antara 0,00-20,00 yaitu sebesar 2.73%. Hal ini berarti bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pengeluaran rutin masih sangat kurang.

Dengan kurangnya rasio Indeks Kemampuan Rutin maka tingkat pengeluaran rutin yang dilakukan di Kabupaten Natuna tentu sangat kurang karena pemerintah tidak mampu melakukan pengeluaran rutin dengan baik dengan menggunakan anggaran yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian David efendi Sri wuryanti (2011) tentang Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah Dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Di kabupaten nganjuk. Dalam penelitian David (2011) menyatakan rasio Indeks Kemampuan Rutin yang juga mempunyai status yang sangat kurang

Rasio Kecerasan

Nilai rasio belanja rutin untuk 5 tahun terakhir Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

INSERT TABEL 4

Nilai rasio belanja pembangunan untuk 5 tahun terakhir Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

INSERT TABEL 5

rasio kecerasan, diketahui bahwa rasio belanja rutin selalu lebih besar daripada rasio belanja pembangunan. Artinya sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin atau belanja langsung sehingga rasio belanja pembangunan atau belanja tidak langsung relatif kecil.

Dengan tinggi rasio belanja rutin dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah lebih mementingkan belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian David efendi Sri wuryanti (2011) tentang Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah Dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Di kabupaten nganjuk. Dalam penelitian David (2011) menyatakan rasio kecerasan yang juga mempunyai persentase rasio belanja rutin yang lebih besar dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan.

Rasio Pertumbuhan

Nilai rasio pertumbuhan untuk 5 tahun terakhir Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

INSERT TABEL 6

PAD pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4% di tahun 2010. Kemudian PAD kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 45.34% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 PAD mengalami pertumbuhan positif sebesar 20.84%. dan pada tahun 2013 PAD tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 11.28%.

TDP pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -22.08% di tahun 2010. Kemudian TDP kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 57.87% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 TDP mengalami pertumbuhan positif sebesar 36.36%. dan pada tahun 2013 TDP tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 18.97%.

Berdasarkan Rasio Pertumbuhan, selama periode penelitian terjadi pertumbuhan positif sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi pertumbuhan yang negatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Juliet marla hetharia Harijanto sabiono Inggriani elim tentang Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung Pelaksanaan otonomi daerah di kota bitung (periode 2008-2012). Dalam penelitian David (2011) menyatakan rasio pertumbuhan rata-rata positif dan negatif.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Data yang berasal dari APBD kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur

dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki rata-rata diantara 0 %-25 % yaitu sebesar 2.11%. Artinya angka tersebut memiliki status rendah sekali.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal atau otonomi Fiskal Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Natuna selama lima tahun memiliki rata-rata sebesar 2,07%. hal ini berarti bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan masih sangat kurang.

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin yaitu : Proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari

pemerintah pusat (kuncoro, 1997 : 9).

Rasio Indeks Kemampuan Rutin selama lima tahun pada pemerintah Kabupaten Natuna masuk dalam skala yang sangat kurang, karena berada dalam skala interval antara 0,00-20,00 yaitu sebesar 2.73%.

4. Rasio Keserasian

Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Berdasarkan rasio keserasian, diketahui bahwa rasio belanja rutin selalu lebih besar daripada rasio belanja pembangunan. Artinya sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin atau belanja langsung sehingga rasio belanja pembangunan atau belanja tidak langsung relatif kecil.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan, selama periode penelitian terjadi pertumbuhan positif sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi pertumbuhan yang negatif

2. Saran

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan.
2. Penelitian ini tidak dapat menganalisis keseluruhan unsur perkembangan APBD, sehingga tidak didapatkan hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, hendaknya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi. Disamping itu diharapkan juga mampu meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan, menyiapkan sistem administrasi dan komputerisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dan memacu pengembangan BUMD yang dapat meningkatkan PAD.
2. Kepada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan model analisis rasio keuangan lainnya sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh, sehingga didapatkan hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. No. 58 tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- _____. No. 33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Abdul Halim dan Syukri Abdullah. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Belanja PEMDA: Studi Kasus Kabupaten dan kota di Jawa dan Bali*. *Jurnal Ekonomi STEI No. 2 Tahun XIII/25*.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: PT Indeks
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. 201
- Mahmudi, 2006, *Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik : Standar Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF. E.
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Natahiddin. 2011. *Potensi Dana Perimbangan pada Pemerintahan Daerah di*

- Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta. UPP YKPN.
- Purwanti, Rita Eni dan Indah Nugraheni, 2011. *Siklus Akuntansi.* Kanisius. Yogyakarta.
- Sugianto, 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah, Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah.* Cikal Sakti. Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel. 2007. *Manajemen Publik.* Jakarta: Grasindo.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. *Otonomi Daerah.* Nuansa Aulia. Bandung.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 004 tentang *Pemerintahan Daerah.*
- Widodo. 2011. *Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta. UPP YKPN
- Yulianti. 2011. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta. UPP YKPN.

LAMPIRAN

TABEL 1
Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Natuna (Tahun 2009-2013)

Tahun	Rasio Kemandirian	Status	Perkembangan
2009	1.90 %	rendah sekali	-
2010	2.55 %	rendah sekali	Meningkat
2011	2.35 %	rendah sekali	Turun
2012	2.07 %	rendah sekali	Turun
2013	1.94 %	rendah sekali	Turun
Rata-Rata	2.11 %	rendah sekali	

TABEL 2
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Natuna (Tahun 2009-2013)

Tahun	PAD	TPD	Persentase	Kemampuan Keuangan
2009	13.792.431.000	739.369.000.000	1,87 %	Sangat Kurang
2010	14.344.000.000	576.140.225.000	2,49 %	Sangat Kurang
2011	20.847.000.000	909.538.449.000	2,29 %	Sangat Kurang
2012	25.191.700.000	1.240.230.154.700	2,03 %	Sangat Kurang
2013	28.033.510.000	1.475.497.419.170	1,90 %	Sangat Kurang

TABEL 3
Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Natuna (Tahun 2009-2013)

Tahun	PAD	Pengeluaran Rutin	Persentase	Kemampuan Keuangan
2009	13.792.431.000	597.294.110.434	2,31 %	Sangat Kurang
2010	14.344.000.000	483.798.810.772	2,96 %	Sangat Kurang
2011	20.847.000.000	710.636.992.631	2,93 %	Sangat Kurang
2012	25.191.700.000	943.538.994.940	2,67 %	Sangat Kurang
2013	28.033.510.000	1.009.917.973.525	2,78 %	Sangat Kurang
Rata-Rata	20.441.728.200	749.037.376.460	2,73 %	

TABEL 4
Perhitungan Rasio Belanja Rutin Kabupaten Natuna (Tahun 2009-2013)

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Rutin	Perkembangan	Rasio Belanja Rutin
2009	999.369.000.000	597.294.110.434	-	59,77%
2010	835.284.800.000	483.798.810.772	-19,00 %	57,92%
2011	1.148.858.449.000	710.636.992.631	46,89 %	61,86%
2012	1.500.000.000.000	943.538.994.940	32,77 %	62,90%
2013	1.620.497.419.170	1.009.917.973.525	7,04 %	62,32%

TABEL 5
Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2009-2013

Tahun	Total Belanja	Realisasi Belanja Pembangunan	Perkembangan	Rasio Belanja Pembangunan
2009	999.369.000.000	402.074.889.566	-	40,23 %
2010	835.284.800.000	351.485.989.225	-12,58 %	42,08 %
2011	1.148.858.449.000	438.221.456.369	24,68 %	38,14 %
2012	1.500.000.000.000	556.461.005.060	26,98 %	37,10 %
2013	1.620.497.419.170	610.579.445.645	9,73 %	37,68 %

Sumber: Data Olahan 2014

Tabel 6
Rasio Pertumbuhan Kabupaten Natuna (Tahun 2009-2013)

No	Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013
1	PAD	13.792.431.000	14.344.000.000	20.847.000.000	25.191.700.000	28.033.510.000
2	Pertumbuhan PAD		4,00 %	45,34 %	20,84 %	11,28 %
3	TDP	739.369.000.000	576.140.225.000	909.538.449.000	1.240.230.154.700	1.475.497.419.170
4	Pertumbuhan TDP		-22,08 %	57,87 %	36,36 %	18,97 %
5	Belanja Pembangunan	402.074.889.566	351.485.989.225	438.221.456.369	556.461.005.060	610.579.445.645
6	Pertumbuhan Belanja Pembangunan		-12,58 %	24,68 %	26,98 %	9,73 %
7	Belanja Rutin	597.294.110.434	483.798.810.772	710.636.992.631	943.538.994.940	1.009.917.973.525
8	Pertumbuhan Belanja Rutin		-19,00 %	46,89 %	32,77 %	7,04 %